



## **Optimalisasi Wifi Bakti Aksi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan di Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu**

Hotlif A Nope<sup>1\*</sup>, Aprianus Paskalius Taboen<sup>2</sup>, Imelda Nahak<sup>3</sup>, Petrus Selestinus Mite<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Dosen Sosiologi FISIP, Universitas Nusa Cendana

\*Email: [hotlifenope@staf.undana.ac.id](mailto:hotlifenope@staf.undana.ac.id)

### **Abstrak**

Program pengabdian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan *Wifi Bakti Aksi* dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengurusan dokumen administrasi kependudukan di Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Meskipun infrastruktur internet telah tersedia di desa- desa, pemanfaatannya masih terbatas pada kebutuhan internal. Melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), kegiatan ini melibatkan masyarakat, pemerintah desa, dan Disdukcapil secara aktif dalam sosialisasi, pelatihan, dan simulasi penggunaan aplikasi layanan digital SAPA Raimanuk. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam literasi digital masyarakat, kapasitas aparatur desa, serta kolaborasi lintas sektor. Kegiatan ini membuktikan bahwa penguatan kapasitas lokal dan pendekatan berbasis komunitas mampu mendorong transformasi digital pelayanan publik di wilayah 3T. Rekomendasi diarahkan pada replikasi model ini di wilayah serupa, dengan dukungan regulasi dan pendampingan berkelanjutan.

**Kata kunci:** administrasi kependudukan; transformasi digital; wifi bakti aksi; partisipatif; pelayanan desa

### **Abstract**

*This community service program aims to optimize the use of the Wifi Bakti Aksi network to improve the quality of civil administration services in Raimanuk District, Belu Regency. Although internet infrastructure is already available in the villages, its use has been limited to internal administrative tasks. Using a Participatory Action Research (PAR) approach, the program actively engaged the community, village governments, and the Civil Registry Office in awareness sessions, training, and digital service simulations through the SAPA Raimanuk application. The program led to notable improvements in digital literacy among citizens, the capacity of local officials, and intersectoral collaboration. The findings demonstrate that local capacity building and community-based approaches can effectively drive the digital transformation of public services in underdeveloped regions. The study recommends replicating this model in similar areas, supported by appropriate regulations and sustained assistance.*

**Keywords:** civil administration; digital transformation; bakti aksi wi-fi; participatory; village services



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Administrasi kependudukan merupakan elemen dasar yang menjamin identitas dan status hukum seseorang dalam negara. Kepemilikan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, hingga Akta Kematian, menjadi pintu akses terhadap pelayanan publik dan perlindungan sosial. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa dokumen administrasi kependudukan tidak hanya menjadi alat bukti identitas, tetapi juga menjadi syarat dalam pengajuan layanan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga bantuan sosial (Pasal 1 dan 13A).

Namun, tantangan besar dihadapi oleh masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), termasuk Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kecamatan ini berjarak sekitar 27,8 km dari Atambua (ibu kota kabupaten) dengan waktu tempuh rata-rata 42 menit, melintasi beberapa ruas jalan yang kondisinya rusak berat saat musim hujan (Google Maps, 2025). Kecamatan Raimanuk terdiri dari 9 desa, yaitu Renrua, Mandeu Raimanus, Faturika, Duakoran, Mandeu, Rafae, Teun, Leuntolu, dan Tasain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu tahun 2023, jumlah penduduk di Kecamatan Raimanuk mencapai 19.136 jiwa. Meskipun tidak tersedia data terperinci mengenai kelengkapan dokumen kependudukan per kecamatan, laporan nasional dari Ditjen Dukcapil Kemendagri mencatat bahwa secara umum masih terdapat sekitar 2,81% penduduk usia wajib KTP di Indonesia yang belum melakukan perekaman e-KTP pada semester I tahun 2024 (Kemendagri, 2024).

Permasalahan utama yang mengemuka adalah minimnya akses fisik dan digital terhadap pelayanan publik. Biaya transportasi yang tinggi, keterbatasan literasi administrasi, dan waktu tunggu yang panjang menyebabkan masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukan hingga muncul kebutuhan mendesak. Hal ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat sebagaimana diberitakan dalam media nasional RRI yakni “Kesadaran masyarakat di Kabupaten Belu mengurus KTP dan dokumen lainnya masih sangat rendah” (RRI, 2025).

Padaahal, pemerintah pusat melalui Program Wifi Bakti Aksi telah membangun jaringan internet gratis di berbagai fasilitas umum, termasuk di seluruh kantor desa di Kecamatan Raimanuk, serta beberapa sekolah dan puskesmas. Menurut data Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, pada tahun 2024, setidaknya terdapat 16 titik aktif Wifi Bakti Aksi di Kecamatan Raimanuk. Namun, hasil observasi awal tim pelaksana menunjukkan bahwa pemanfaatan jaringan ini masih sangat terbatas yaitu hanya untuk keperluan internal desa seperti pelaporan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), dan belum menyentuh pelayanan publik digital, khususnya layanan administrasi kependudukan.

Situasi ini menjadi momentum penting untuk mendorong transformasi digital pelayanan publik berbasis desa. Berbagai studi terdahulu mendukung urgensi ini. Penelitian Inan dan Mustofa (2023) di Kabupaten Kaimana menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem digital pelayanan kependudukan dapat memangkas waktu pengurusan dari rata-rata 5 hari menjadi 1 hari, dengan efisiensi anggaran hingga 60%. Penelitian Lintang dan Suherman (2023) di Kota Tangerang juga menegaskan perlunya penyederhanaan alur dan peningkatan literasi digital masyarakat untuk mempercepat realisasi layanan berbasis daring.

Selain itu, beberapa kegiatan PKM serupa telah terbukti efektif. Contohnya, Program PKM Universitas Gadjah Mada (UGM) di Desa Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, DIY (2021) berhasil memanfaatkan jaringan internet desa untuk memfasilitasi layanan administrasi kependudukan secara online, bekerja sama dengan Disdukcapil setempat. Dalam 4 bulan, desa tersebut mengalami peningkatan dokumen terbit hingga 48%, dan membentuk kader relawan digital desa. Contoh lain adalah kegiatan PKM Universitas Negeri Malang di Desa Purwosari, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (2022) yang mengembangkan sistem antrian layanan kependudukan via aplikasi berbasis Android, dan berhasil mengurangi waktu tunggu masyarakat hingga 70%.

Dengan latar belakang tersebut, program pengabdian “Optimalisasi Wifi Bakti Aksi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan di Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu” dirancang sebagai upaya konkret untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kesadaran digital masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Program ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang menekankan pelibatan aktif masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya mulai dari identifikasi masalah hingga implementasi dan evaluasi solusi (Buckles, 2019; Chambers, 2002).

Dengan memanfaatkan potensi yang telah tersedia, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi model replikasi pelayanan administrasi publik berbasis digital yang aplikatif di berbagai desa terpencil lainnya, sekaligus meningkatkan kapasitas lokal dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan.

## **METODE**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “*Optimalisasi Wifi Bakti Aksi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan di Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu*” dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini mengikutsertakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Belu, Pemerintah Kecamatan Raimanuk, perwakilan dari lima desa, serta tokoh masyarakat. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 27 orang, mewakili Desa Mandeu, Raimanus, Rafe, Faturika, Leuntolu, dan Teun. Pendekatan partisipatif yang digunakan bertumpu pada prinsip *Participatory Action Research*, di mana seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi dirancang untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan secara langsung, dengan acuan teori perumusan kebijakan publik (Dye, 2005; Buckles, 2019).



Gambar 1: Spanduk Kegiatan PKM dengan tema “*Optimalisasi Wifi Bakti Aksi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan di Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu*”.

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan meliputi empat tahapan utama. Pertama adalah tahap sosialisasi dan edukasi, di mana peserta diberikan pemahaman tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta potensi pemanfaatan Wifi Bakti Aksi untuk memfasilitasi pengurusan dokumen secara daring. Selanjutnya, dilakukan pelatihan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparat desa dan masyarakat dalam mengakses serta menggunakan layanan digital Disdukcapil. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan workshop dan Focus Group Discussion (FGD) yang difokuskan pada identifikasi permasalahan di lapangan, perumusan strategi optimalisasi layanan, serta praktik langsung pengurusan dokumen melalui aplikasi SAPA Raimanuk. Terakhir, kegiatan ditutup dengan evaluasi partisipatif yang dilakukan melalui umpan balik peserta guna menilai efektivitas pelatihan sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan layanan ke depan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam satu rangkaian acara yang dimulai dengan kata pembuka dan doa bersama, dilanjutkan sambutan Camat Raimanuk yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Tim Pengabdian dari Universitas Nusa Cendana kemudian memberikan pengantar mengenai pentingnya dokumen kependudukan. Pemaparan materi inti disampaikan oleh pihak Disdukcapil, menjelaskan secara rinci mekanisme pengurusan dokumen baik secara konvensional maupun digital. Antusiasme peserta terlihat dalam sesi tanya jawab yang membuka ruang bagi masyarakat menyampaikan kendala dan pengalaman mereka. Kegiatan dilanjutkan dengan simulasi dan praktik penggunaan aplikasi SAPA Raimanuk (Sistem Administrasi Pelayanan Kependudukan Kecamatan Raimanuk) sebagai media layanan pengurusan dokumen kependudukan berbasis daring. Para peserta kemudian diminta memberikan umpan balik terhadap aplikasi tersebut untuk menilai kemudahan dan fungsionalitasnya. Acara ditutup dengan doa penutup, dilanjutkan dengan makan bersama, dan kemudian seluruh peserta kembali ke tempat masing-masing. Keseluruhan rangkaian kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan partisipatif yang terstruktur dapat menjadi strategi efektif dalam mendorong transformasi layanan publik berbasis teknologi di wilayah pedesaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Program Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertema “*Optimalisasi Wifi Bakti Aksi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan di Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu*” telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025 bertempat di Kantor Desa Mandeu. Kegiatan dimulai pukul 09.00 WITA dan berlangsung hingga selesai dengan melibatkan 27 peserta yang merupakan perwakilan masyarakat dari beberapa desa sekitar, aparat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan kecamatan. Secara umum, kegiatan ini berhasil mencapai beberapa capaian nyata dan terukur sebagai berikut:

*Pertama*, Peningkatan Literasi Digital dan Kesadaran Administratif Masyarakat Melalui sesi sosialisasi dan diskusi interaktif, peserta memperoleh pemahaman baru mengenai urgensi kepemilikan dokumen administrasi kependudukan seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian dalam kaitannya dengan akses terhadap pelayanan publik dan perlindungan sosial. Banyak peserta yang sebelumnya belum memahami manfaat administratif dari dokumen-dokumen tersebut kini menunjukkan minat untuk segera melengkapinya. Hal ini ditunjukkan dari tingginya partisipasi dalam simulasi pengisian formulir *online* dan tanya jawab mengenai prosedur pengurusan dokumen secara digital.



Gambar 2: Peningkatan Literasi Digital dan Kesadaran Administratif Masyarakat

*Kedua*, Pemanfaatan Wifi Bakti Aksi secara Produktif Sebelum kegiatan ini, jaringan Wifi Bakti Aksi yang tersedia di Kantor Desa Mandeu dan beberapa titik lainnya hanya digunakan sebatas pelaporan administrasi internal desa seperti Siskeudes. Namun pasca pelatihan, peserta mulai memahami bahwa jaringan internet ini dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat untuk mengakses layanan publik daring, khususnya pengurusan

dokumen kependudukan melalui platform milik Disdukcapil seperti aplikasi *SAPA Raimanuk*. Bahkan beberapa aparat desa menyatakan siap menjadikan kantor desa sebagai *service point* informal bagi warga yang mengalami kesulitan teknis dalam akses digital.



Gambar 3: Pemanfaatan WIFI Bakti Aksi secara Produktif

*Ketiga*, Peningkatan Kapasitas Aparat Desa. Dalam sesi pelatihan teknis, para perangkat desa diberikan pelatihan langsung mengenai langkah-langkah pengurusan dokumen kependudukan secara daring, termasuk penggunaan aplikasi berbasis web dan media komunikasi seperti *WhatsApp*. Mereka juga diajarkan untuk melakukan pendampingan masyarakat dalam proses unggah dokumen dan konsultasi dengan Disdukcapil secara *online*. Kemampuan ini menjadi penting dalam rangka memperpendek rantai birokrasi dan mengurangi beban mobilisasi masyarakat ke pusat layanan di Atambua.



Gambar 4: Peningkatan Kapasitas Aparat Desa

*Keempat*, Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor. Salah satu capaian strategis dari kegiatan ini adalah terbangunnya komitmen awal untuk kolaborasi lintas sektor antara pemerintah desa, kecamatan, dan pihak Disdukcapil Kabupaten Belu. Dalam diskusi kelompok (FGD), muncul ide pembentukan “Tim Operator Adminitrasi Desa” yang terdiri dari perangkat desa dan pemuda lokal yang siap membantu masyarakat secara berkelanjutan.

Tim ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak layanan berbasis digital di masing-masing desa.



Gambar 5: Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

*Kelima*, Identifikasi Hambatan dan Solusi Nyata. Hasil diskusi kelompok mengungkap sejumlah hambatan utama, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya informasi prosedural, serta kendala teknis terkait perangkat dan jaringan. Kegiatan ini kemudian memberikan solusi praktis, seperti penggunaan platform yang lebih sederhana dan ramah pengguna, misalnya layanan berbasis *WhatsApp*, serta mengoptimalkan waktu layanan di kantor desa menjadi lebih proaktif dalam mendampingi masyarakat.



Gambar 6: Identifikasi Hambatan dan Solusi Nyata

*Keenam*, Evaluasi Respons Peserta. Berdasarkan diskusi evaluatif di akhir kegiatan, mayoritas peserta menyatakan bahwa pelatihan ini memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menggunakan teknologi untuk pengurusan administrasi kependudukan. Peserta juga mengapresiasi pendekatan *learning by doing* melalui simulasi langsung dan mengusulkan agar kegiatan serupa dilakukan secara berkala di seluruh desa di Kecamatan Raimanuk.



Gambar 7: Evaluasi Respons Peserta

Dengan keseluruhan capaian ini, kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Tim Dosen Program Studi Sosiologi FISIP UNDANA tidak hanya berhasil menyosialisasikan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, tetapi juga membuka ruang inovasi pelayanan publik di desa-desa terpencil berbasis teknologi yang telah tersedia, namun sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Hasil ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas dengan pendekatan partisipatif dapat secara efektif mendorong transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan di wilayah 3T.

### **Penguatan Layanan Publik Digital di Perdesaan**

Program pengabdian ini memperlihatkan dinamika transformasi pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perdesaan melalui pendekatan partisipatif yang bertumpu pada pemanfaatan teknologi informasi. Titik tekan dari kegiatan bukan sekadar pada penyediaan infrastruktur digital, melainkan bagaimana infrastruktur tersebut diberdayakan melalui peningkatan kapasitas sosial dan kelembagaan di tingkat lokal.

Secara konseptual, inisiatif ini membuktikan bahwa ketersediaan jaringan internet seperti Wifi Bakti Aksi, meskipun signifikan, tidak serta-merta berbanding lurus dengan pemanfaatan layanan publik berbasis digital. Hal ini mengafirmasi gagasan Warschauer (2003) bahwa kesenjangan digital tidak hanya soal akses fisik terhadap teknologi, tetapi juga mencakup dimensi penggunaan, literasi, dan relevansi sosial dari teknologi tersebut. Dalam konteks Kecamatan Raimanuk, kendala utama bukan pada tidak tersedianya internet, tetapi pada tidak adanya sistem sosial dan pengetahuan yang memadai untuk mengoptimalkannya

dalam mendukung pelayanan kependudukan.

Dengan merujuk pada pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), program ini tidak menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat pasif, melainkan sebagai subjek yang berperan aktif dalam proses perubahan. Melalui pelibatan masyarakat desa, perangkat pemerintah lokal, dan pihak Disdukcapil dalam satu rangkaian kegiatan yang bersifat kolaboratif, program ini merealisasikan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Buckles (2019) dan Chambers (2002) mengenai transformasi berbasis keterlibatan akar rumput. Keterlibatan tersebut tidak hanya mendorong peningkatan literasi digital secara individual, tetapi juga membentuk pola kerja kolektif baru di tingkat desa.

Penting dicatat bahwa keberhasilan program ini tidak hanya terletak pada aspek teknis seperti kemampuan warga dalam menggunakan aplikasi pelayanan tetapi juga dalam terbentuknya jaringan sosial baru yang memperkuat struktur pelayanan publik. Ini sejalan dengan gagasan Putnam (2000) mengenai *social capital*, bahwa kepercayaan dan kerja sama dalam komunitas lokal merupakan prasyarat penting bagi efektivitas kebijakan publik, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan birokrasi formal. Pembentukan inisiatif desa, seperti operator layanan digital berbasis komunitas, menjadi wujud konkret dari penguatan modal sosial tersebut.

Selain itu, pendekatan kolaboratif dalam kegiatan ini juga menunjukkan kesesuaian dengan kerangka teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dye (2005), di mana kebijakan yang efektif lahir dari proses interaksi antar-aktor yang heterogen. Dalam kasus ini, universitas bertindak sebagai fasilitator pengetahuan, pemerintah desa sebagai pelaksana teknis, dan masyarakat sebagai pemilik masalah sekaligus agen perubahan. Pola ini mencerminkan model tata kelola publik yang kooperatif, menggeser paradigma birokratis *top-down* ke arah *co-production of public services* (Bovaird, 2007).

Dari sisi desain teknologi, respons masyarakat terhadap sistem pelayanan digital menunjukkan pentingnya adaptasi teknologi terhadap konteks lokal. Alih-alih mengandalkan aplikasi yang kompleks, warga lebih mudah beradaptasi dengan media komunikasi yang sudah familier seperti *WhatsApp*. Ini mendukung pandangan Schumacher (1973) tentang *appropriate technology*, yaitu bahwa keberhasilan teknologi dalam pembangunan sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan struktur sosial, kultural, dan ekonomi masyarakat

pengguna.

Dengan demikian, hasil dari kegiatan ini tidak hanya memperlihatkan capaian operasional dalam jangka pendek, tetapi juga membuka kemungkinan replikasi sistem pelayanan berbasis komunitas di wilayah lain dengan karakteristik serupa. Intervensi ini menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif bukan semata hasil dari kebijakan pusat, tetapi dapat diinisiasi dari bawah melalui sinergi antaraktor lokal dan penguatan ekosistem digital yang partisipatif.

## KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat bertema *Optimalisasi Wifi Bakti Aksi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan di Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu* telah membuktikan bahwa akses teknologi digital di wilayah pedesaan, jika diiringi dengan pendekatan partisipatif dan penguatan kapasitas lokal, mampu mendorong transformasi pelayanan publik secara nyata. Kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi digital masyarakat, mengubah fungsi jaringan *Wifi* dari sekadar pelaporan internal menjadi sarana akses layanan publik, serta membentuk kolaborasi lintas sektor antara masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, dan Disdukcapil.

Di samping itu, keberhasilan kegiatan ini juga ditunjang oleh penggunaan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal, seperti pemanfaatan aplikasi yang sederhana dan media komunikasi yang sudah familier seperti *WhatsApp*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tantangan layanan administrasi kependudukan di daerah 3T tidak hanya terletak pada aspek infrastruktur, tetapi juga pada lemahnya ekosistem sosial dan kelembagaan yang mendukung pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan regulasi daerah yang mendorong digitalisasi layanan kependudukan berbasis desa, pengembangan sistem pelayanan yang ramah pengguna oleh Kominfo dan Disdukcapil, serta program pendampingan jangka panjang agar transformasi yang telah dimulai dapat berlanjut secara berkelanjutan dan direplikasi ke wilayah lain dengan karakteristik serupa.

Pendekatan kolaboratif yang dilakukan dalam kegiatan ini memberikan pelajaran penting bahwa transformasi digital di wilayah pedesaan paling efektif jika dimulai dari bawah dan melibatkan semua aktor secara aktif sebagai bagian dari perubahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bovaird, T. (2007). Beyond engagement and participation: User and community co-production of public services. *Public Administration Review*, 67(5), 846–860. Doi: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00773.x>
- BPS Belu. (2023). *Kecamatan Raimanuk dalam angka 2023*. Atambua: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.
- Buckles, D. (2019). *Participatory action research: Theory and methods for engaged inquiry*. London: Routledge. Doi: <https://doi.org/10.4324/9780429468853>
- Chambers, R. (2002). *Participatory workshops: A sourcebook of 21 sets of ideas and activities*. London: Earthscan Publications.
- Dye, T. R. (2005). *Understanding public policy* (11th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Google Maps. (2025). *Rute perjalanan Kecamatan Raimanuk ke Atambua*. Diakses pada 10 Juni 2025 dari <https://maps.google.com>
- Inan, M., & Mustofa, M. (2023). Digitalisasi layanan administrasi kependudukan berbasis aplikasi di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Transformasi Digital*, 5(1), 15–28. Doi: <https://doi.org/10.24198/jtd.v5i1.2023>
- Kemendagri. (2024). *Laporan semester I 2024 tentang capaian perekaman KTP-el secara nasional*. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kominfo Provinsi NTT. (2024). *Laporan pemanfaatan Wifi Bakti Aksi di wilayah NTT*. Kupang: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Lintang, A. R., & Suherman, R. (2023). Percepatan layanan publik melalui digitalisasi administrasi di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 10(2), 135–150. Doi: <https://doi.org/10.21009/jipp.102.08>
- Program PKM UGM. (2021). *Peningkatan akses administrasi kependudukan melalui digitalisasi Desa Nglanggeran*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Program PKM Universitas Negeri Malang. (2022). *Sistem antrian digital untuk pelayanan dokumen kependudukan di Desa Purwosari*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster.
- RRI. (2025). Masyarakat Belu masih rendah kesadaran urus KTP. *Radio Republik Indonesia*. Diakses dari <https://rri.go.id/berita/belu/2025>
- Schumacher, E. F. (1973). *Small is beautiful: Economics as if people mattered*. London: Harper & Row.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232*.
- Warschauer, M. (2003). *Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide*. Cambridge, MA: MIT Press.